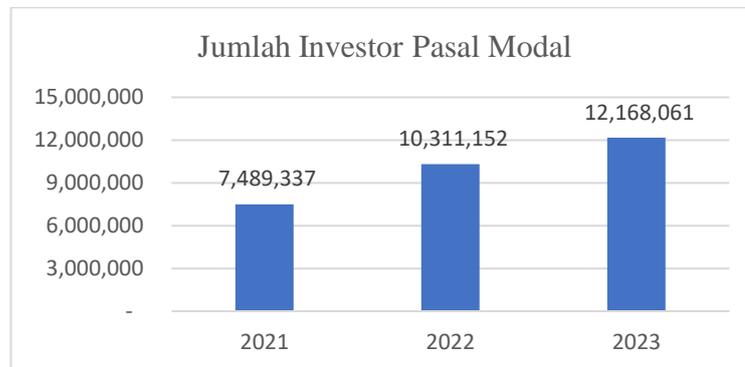


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi merupakan sebuah langkah pertama dalam membangun perekonomian bangsa. Dengan demikian, seseorang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara berinvestasi (Destina Paningrum, 2022:1). Salah satu investasi yang banyak diketahui oleh khalayak umum adalah investasi saham di pasar modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar modal menjadi elemen penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Hadirnya Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007, investasi di pasar modal menjadi alternatif dalam berinvestasi karena mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat (Marfuah & Dewati, 2021). Di pasar modal sendiri, jumlah investor menunjukkan grafik yang positif, yaitu dengan adanya kenaikan jumlah investor di tiga tahun terakhir.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Jumlah Investor Pasar Modal

Sumber: (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021, 2022, 2023)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga tak luput dari peran sektor perbankan (Maharani, 2023). Hal tersebut tercermin dengan sektor perbankan yang mendominasi jumlah investor terbanyak di bulan Mei 2024. Dikutip dari cnbcindonesia.com (2024) jumlah investor terbanyak per Mei 2024 dipimpin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah investor 517,854 yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebanyak 447,812 investor, di urutan kedua PT. Bank Central Asia dengan jumlah investor 362,976, di urutan ke tujuh PT. Bank Negara Indonesia dengan jumlah investor 180,474 dan di urutan ke

delapan PT. Bank Mandiri dengan jumlah investor 173,449. Dengan adanya banyaknya jumlah investor maka penting untuk menjaga kepercayaan para investor dengan melakukan jasa audit untuk menciptakan transparansi. Selaras Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 (perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015) Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dimana Bank wajib mempublikasikan laporan bulanan, triwulanan, tahunan, dan lain-lain yang meliputi informasi umum (untuk laporan tahunan), laporan keuangan, informasi kinerja keuangan, informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, serta susunan Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti suku bunga dasar kredit, fakta material, dan perkembangan industri perbankan.

Selain itu, laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan harus dipastikan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara andal, akurat serta disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji material. Untuk memastikan itu semua, perusahaan memerlukan adanya proses audit eksternal oleh kantor akuntan publik. Menurut Ginting (2023) kesadaran akan pentingnya audit laporan keuangan di Indonesia makin meningkat. Audit laporan keuangan merupakan aktivitas untuk menilai dan menentukan apakah laporan keuangan yang tersaji sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan serta memastikan tidak ada salah saji material yang berpengaruh dalam laporan keuangan (Arum Ardianingsih, 2021:4).

Perusahaan perlu melakukan proses audit laporan keuangan untuk dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas *agent* terhadap *principal* serta mengurangi masalah keagenan. Menurut Pradana & Purwanto (2016) adanya hubungan kerja antara pemilik yaitu pihak pemberi wewenang (*principal*) dengan manajer sebagai pihak yang menerima wewenang (*agent*) menjadi prinsip utama dalam teori keagenan. Adanya pemisahan antara pemilik dan manajer cenderung menimbulkan konflik kepentingan. Konflik ini timbul karena terdapat asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Agen mempunyai informasi lebih terkait

operasional dan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan adanya asimetri informasi tersebut, agen dikhawatirkan melakukan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memonitoring keputusan agen. Namun dalam upaya tersebut, prinsipal akan mengeluarkan biaya monitoring untuk memastikan informasi yang tersaji dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan mengontrol jika ada kecurangan yang dilakukan oleh manajer (Sanusi & Purwanto, 2017). Perusahaan memerlukan pihak independen untuk melakukan monitoring terhadap agen, pihak independen tersebut adalah audit eksternal. Dalam proses melakukan monitoring perusahaan akan mengeluarkan biaya monitoring, biaya tersebut adalah *fee* audit.

Fee audit merupakan imbalan yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Institut Akuntan Publik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024 terkait Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Dalam surat tersebut dipaparkan terkait metode penentuan imbalan jasa audit, dimana anggota dapat menggunakan realisasi jam kerja tim dan personil untuk menentukan tarif keseluruhan imbalan jasa dengan nilai maksimal sesuai pagu maksimal yang telah ditetapkan. Menurut Hay (2013), *client attributes*, *auditor attributes*, dan *engagement attributes* dapat menjadi faktor penentu besaran *fee* audit. Pada sektor perbankan sendiri, *fee* audit memiliki besaran yang beragam, grafik di bawah menunjukkan rata-rata *fee* audit pada perusahaan perbankan pada tahun 2021-2023.



Gambar 1.2 Grafik Rata-rata *Fee* Audit perusahaan Perbankan 2021-2023

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Data yang disajikan pada grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan pada rata-rata *fee* audit periode 2021-2023, yang diperoleh dari 20 perusahaan yang dijadikan sampel pada dalam penelitian ini. Meskipun berada di sektor yang sama yaitu perbankan, namun perusahaan memiliki nominal *fee* audit yang berbeda-beda. Seperti pada PT. Bank Rakyat Indonesia, pada tahun 2023 mengeluarkan *fee* audit sejumlah Rp 15,922,000,000, *fee* audit tersebut merupakan *fee* audit tertinggi di antara perusahaan perbankan lainnya dan melebihi dari rata-rata *fee* audit pada tahun 2023. Sementara *fee* audit terendah pada tahun 2023 dibebankan oleh Bank Oke Indonesia dengan *fee* audit sebesar Rp 266,400,000. Menurut Fauzan & Cahyonowati (2024) *fee* audit bergantung pada kesepakatan yang dicapai antara kantor akuntan publik dengan klien. Faktor auditor dan *auditee* menjadi penentu besaran *fee* audit.

Dari sisi faktor auditor, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi salah satu faktor penentu besaran *fee* audit. Menurut Pertiwi (2019) KAP yang berafiliasi dengan firma akuntan luar negeri yang bertaraf internasional memiliki kualitas audit yang tinggi. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak selaras dengan beredarnya sejumlah kasus yang melibatkan KAP mengakibatkan turunnya reputasi KAP dan kualitas audit serta merusak kepercayaan klien serta masyarakat. Dilansir dari finansial.bisnis.com (2023) terdapat sejumlah KAP yang memiliki daftar hitam dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan. KAP yang memiliki daftar hitam di antaranya adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Thajo dan Rekan afiliasi *Crowe Horwarth* Internasional akibat dari kasus PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan afiliasi *Deloitte* Indonesia yang dilarang menambah klien baru pada tahun 2018, akibat dari kasus *SNP Finance*, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan afiliasi dari BDO Internasional yang dijatuhkan pembekuan izin selama 12 bulan akibat dari kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 201, KAP Purwantoro Sungkoro dan Surja afiliasi dari *Ernst and Young Global Limited* akibat dari ketidakcermatan dalam mengaudit laporan keuangan Hanson Internasional pada tahun buku 2016.

Namun meskipun terkena beberapa skandal, KAP yang berafiliasi dengan firma akuntan luar negeri masih menjadi mendominasi pasar KAP di Indonesia, hal tersebut dikarenakan KAP sudah memiliki nama yang besar dan sumber daya yang mumpuni. Jika ada rekanan AP atau KAP yang terlibat kasus dan mendapatkan sanksi, maka rekanan lain masih bisa dipercaya dan digunakan oleh pengguna jasa (Dewi, 2019).

Menurut Barton et al (2005) para pemegang saham akan bergantung pada reputasi KAP sebagai tolak ukur keandalan pelaporan keuangan. KAP yang sudah bereputasi atau yang sudah memiliki nama besar memiliki dana yang memadai, sehingga mereka dapat berinvestasi dalam pelatihan staf serta meningkatkan teknologi dan fasilitas audit yang bisa meningkatkan kualitas mereka, sehingga *fee* yang akan dibebankan akan tinggi (Yulianti et al., 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia et al (2024) yang menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Naser & Hassan (2016) yang menunjukkan hasil bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Selain dari faktor auditor, faktor *auditee* juga menjadi acuan untuk menentukan besaran *fee* audit yaitu *maturity* pengendalian internal. *Maturity* dalam perusahaan merujuk pada kondisi dimana perusahaan dalam kondisi sempurna untuk mencapai tujuannya (Andersen & Jessen, 2003). Auditor dapat menilai tingkat kematangan pengendalian internal perusahaan dengan merujuk pada Standar Audit 315, dimana auditor memiliki pemahaman atas pengendalian internal yang dapat menjadi faktor untuk menentukan besaran *fee* audit. Dalam Standar Audit 315 pengendalian internal memiliki lima komponen di antaranya lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, sistem informasi, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit, dan pemantauan atas pengendalian.

Komponen pengendalian internal pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi fungsi tata kelola dan manajemen, sikap, kesadaran, dan tindakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta manajemen dalam mengendalikan pengendalian internal perusahaan. Komite Audit mempunyai peran fundamental di lingkungan pengendalian perusahaan. Peran

komite audit dalam perusahaan adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, memastikan perusahaan telah menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko, dan *Good Corporate Governance*, serta memastikan bahwa fungsi audit eksternal dan audit internal beroperasi dengan baik (Pedoman Tata Kelola Perusahaan, 2011).

Komite audit secara tidak langsung menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan akan berhubungan langsung dengan auditor eksternal hingga akan berpengaruh untuk penentuan *fee* audit (Sitompul, 2019). Menurut Fattah & Nurbaiti (2023) perusahaan memerlukan banyak jumlah anggota komite audit untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang baik. Menurut Afenya et al (2022) perusahaan yang mempunyai ukuran komite audit yang besar, akan lebih efektif untuk memastikan pengawasan mendalam yang dapat membantu mengurangi upaya dan risiko audit, hingga dapat mengurangi *fee* audit (Afenya et al., 2022). Berbanding terbalik dengan pernyataan Wulandari & Nurmala (2019) dimana perusahaan yang memiliki ukuran komite audit yang besar akan memilih auditor eksternal yang memiliki kualitas tinggi hingga akan mengeluarkan *fee* audit yang besar. Sejalan dengan penelitian Wulandari & Nurmala (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit, sementara penelitian yang dilakukan oleh Afenya et al (2022) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit, dan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Cahyonowati (2024) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

Kedua yaitu proses penilaian risiko entitas. Penilaian risiko merupakan langkah dalam manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan cara bagaimana perusahaan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas perusahaan. Dalam industri perbankan, diwajibkan untuk menerapkan tata kelola serta manajemen risiko yang efektif untuk menjaga keamanan siber. Ancaman siber pernah dirasakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), pada tahun 2023, layanan bank syariah dilaporkan sempat lumpuh selama kurang lebih 5 hari. Indikasi dari gangguan tersebut akibat adanya serangan peretas (*hacker*) yang diretas oleh *Lockbit*, peretas

asal Rusia. Peretas mengklaim telah mencuri data sebanyak 1,5 terabyte, termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai (bbc.com, 2023). Selain BSI, pada tahun 2016, Bank BNI juga pernah mendapatkan tindakan *cyber crime* dimana terdapat pembobolan sejumlah rekening nasabah di Kantor Cabang BNI Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pelaku mengambil data nasabah secara ilegal dan melakukan manipulasi ATM hingga dapat menarik data nasabah (Sulistiyono, 2016).

Dengan adanya kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa ancaman siber tidak hanya berdampak pada sistem operasional perusahaan, namun terdapat urgensi terkait transparansi mengenai keamanan siber. Perusahaan perlu mengungkapkan risiko keamanan siber karena risiko tersebut merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh pemangku kepentingan. Para investor juga membutuhkan informasi terkait keamanan siber untuk mendukung dalam membuat sebuah keputusan (Héroux & Fortin, 2020). Pengungkapan risiko keamanan siber dapat menjadi hal penting untuk memberi sinyal kepada auditor akan tingkat kesadaran manajemen terhadap masalah keamanan sistem informasi, dan langkah yang diambil untuk melindungi keuangan, mendeteksi ancaman, dan menanggapi masalah keamanan siber. Sehingga auditor eksternal akan mempunyai fokus pada keamanan siber perusahaan, auditor eksternal melakukan evaluasi dalam menilai risiko keamanan siber melalui jumlah kata pada pengungkapan keamanan siber. Oleh karena itu, pengungkapan keamanan siber melalui jumlah kata dapat mempengaruhi penentuan *fee* audit (Calderon & Gao, 2020).

Ketiga yaitu sistem informasi. Seiring berkembangnya waktu, perusahaan diharapkan melakukan optimalisasi aktivitas perusahaan untuk meningkatkan kinerja sehingga tercapainya tujuan perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi perusahaan bisa menghadapi perkembangan tersebut (Anwar & Saiful, 2024). Teknologi informasi (TI) merupakan gabungan antara teknologi komputer dan komunikasi yang digunakan dalam mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, serta manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Naibaho, 2017). Investasi dalam Teknologi Informasi dapat mengembangkan sistem informasi yang lebih efisien, andal, dan aman. Investasi TI telah mengubah proses bisnis dan akuntansi yang sebelumnya

dilakukan secara manual, namun berkat adanya TI proses bisnis dan akuntansi dilakukan secara otomatis. Di sisi lain, investasi TI yang dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan masalah pada pengendalian internal TI atau membuat implementasi pengendalian internal lebih sulit. Lebih lanjut ketika perusahaan meningkatkan investasi TI, maka dapat risiko audit akan meningkat hingga *fee* audit akan dikenakan lebih tinggi (Han et al., 2016). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Han et al., (2016), menunjukkan hasil bahwa investasi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Irfan (2023), menunjukkan hasil bahwa investasi teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Keempat yaitu aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit. Aktivitas pengendalian spesifik meliputi aktivitas yang berkaitan dengan otorisasi, penelaah kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik serta pemisahan tugas. Komite audit mempunyai tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa aktivitas pengendalian berfungsi secara efektif. Menurut (Fauzan & Cahyonowati, 2024) komite audit dengan keahlian khusus dibidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan dan meningkatkan pengawasan sehingga akan meminimalisir permasalahan serta mengurangi risiko dalam pelaporan keuangan. Komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan juga akan memahami masalah terkait akuntansi dan keuangan sehingga *fee* audit yang dibayarkan akan rendah (Rahim, 2018 dalam Susanti & Budi Harsono, 2023). Berbeda dengan yang dinyatakan oleh S. R. Dewi & Eriandani (2022) dimana perusahaan yang memiliki anggota komite audit dengan latar pendidikan akuntansi akan dapat memberikan evaluasi terkait pemilihan kebijakan akuntansi dan dapat menuntut audit yang lebih luas hingga akan berdampak pada penentuan *fee* audit yang tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S. R. Dewi & Eriandani (2022) menunjukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit, sementara penelitian Afenya et al (2022) menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yulio (2016) menunjukkan keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Kelima yaitu pemantauan atas pengendalian. Aktivitas pemantauan atas pengendalian harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Menurut Iftikha & Nazar (2021) peran komite audit dalam perusahaan menjadi jembatan penghubung pihak manajemen dengan auditor eksternal. Intensitas pertemuan komite audit yang tinggi diharapkan dapat menjelaskan terkait permasalahan internal perusahaan kepada auditor eksternal. Dengan demikian jumlah rapat komite audit dapat menjadi indikator untuk menilai efektivitas aktivitas pengendalian internal. Komite audit harus menambah intensitas pertemuan yang tinggi sesuai dengan persyaratan audit agar meningkatnya efektivitas kinerja. Dengan dilakukannya pertemuan komite audit yang rutin dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko akan mengurangi jumlah risiko yang bisa terjadi (Fauzan & Cahyonowati, 2024). Sehingga, semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka akan mengurangi lingkup audit yang dilakukan oleh auditor eksternal sehingga akan berdampak pada pengurangan *fee* (Farooq et al., 2018). Berbanding terbalik dengan pernyataan Komang & Krisnadewi (2024), dimana komite audit yang rutin melakukan pertemuan rutin, akan meminimalisir konflik keagenan disertai dengan permintaan audit yang tinggi sehingga *fee* audit yang dikeluarkan akan tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang & Krisnadewi (2024) yang menunjukkan intensitas rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit, sementara penelitian Farooq et al (2018) menunjukkan hasil bahwa intensitas rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit dan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Cahyonowati, (2024) menunjukkan bahwa intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Dengan adanya inkonsistensi penelitian terdahulu dan fenomena terkait reputasi KAP, *cybersecurity*, dan rata-rata *fee* audit pada perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait faktor yang mempengaruhi *fee* audit dari sisi auditor yaitu reputasi KAP dan dari sisi *auditee* yaitu *maturity* pengendalian internal dengan mengeksplorasi Standar Audit 315 terkait komponen pengendalian internal. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2021-2023. Alasan penulis memilih perusahaan perbankan dikarenakan adanya peningkatan rata-rata *fee* audit pada tahun 2021-2023 dan adanya kasus terkait *cybersecurity*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel pengungkapan keamanan siber dan investasi teknologi informasi yang belum banyak diteliti di Indonesia, dan alat ukur yang berbeda terkait variabel investasi teknologi informasi dimana Han et al., (2016) mengukur dengan total modal IT dibagi total aset dan Irfan (2023) mengukur dengan *software* dibagi aset tak berwujud, sementara dalam penelitian ini, investasi teknologi menggunakan logaritma natural dari total investasi TI (perangkat lunak + perangkat keras + SDM). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Reputasi KAP dan *Maturity* Pengendalian Internal terhadap *Fee* Audit (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah reputasi KAP, ukuran komite audit, pengungkapan keamanan siber, investasi teknologi informasi, keahlian komite audit, dan intensitas rapat komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
2. Apakah reputasi KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
4. Apakah pengungkapan keamanan siber berpengaruh positif terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
5. Apakah investasi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
6. Apakah keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
7. Apakah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP, ukuran komite audit, pengungkapan keamanan siber, investasi teknologi informasi, keahlian komite audit, dan intensitas rapat komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan keamanan siber terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh investasi teknologi informasi terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh keahlian komite audit terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
7. Untuk mengetahui pengaruh intensitas rapat komite audit terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya bagi peneliti sendiri dan pihak-pihak terkait. Diharapkan penelitian akan bermanfaat bagi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *fee* audit dari sisi auditor, yaitu reputasi KAP dan dari sisi *auditee* yaitu *maturity* pengendalian internal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi perusahaan perbankan terkait faktor penentu *fee* audit dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kewajiban *fee* audit sesuai dengan kondisi perusahaan.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai faktor penentu *fee* audit dengan mengeksplorasi pada Standar Audit 315 terkait komponen pengendalian internal.